BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep demokrasi, yang menekankan pentingnya pemilihan pemimpin dan pembentukan pemerintahan secara demokratis. Hal ini berlaku mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemilihan presiden, hingga tingkat paling bawah, seperti pemilihan kepala desa. Masyarakat menginginkan agar setiap pemimpin dipilih melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, gagasan demokratisasi ini semakin kuat seiring dengan aspirasi untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai yang tertinggi, salah satunya melalui mekanisme pemilihan kepala desa secara demokratis.[1]

Sebagai salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat, pemilihan kepala desa secara demokratis menjadi bagian penting dalam proses penguatan demokrasi di tingkat lokal. Proses ini tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat desa, akan tetapi juga dapat berperan dalam memperkuat legitimasi pemerintahan desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat juga mencerminkan pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks ini, pemilihan kepala desa tidak hanya dilihat sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat. Keterlibatan tokoh-tokoh lokal, termasuk kiai, dalam proses ini sering kali menjadi faktor penentu, mengingat

[1] Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, *Jurnal Mimbar Hukum*, (2011), 1

CamScanner

pengaruh mereka yang kuat dalam membentuk opini dan preferensi politik masyarakat. Dengan demikian, pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga wadah bagi berbagai kepentingan lokal yang berusaha mendapatkan dukungan publik.[2]

Lebih jauh lagi, pemilihan kepala desa secara demokratis dapat menjadi tolak ukur sejauh mana demokrasi berjalan efektif di tingkat akar rumput. Proses ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat berperan aktif dalam menentukan pemimpin lokal yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi desa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam terkait peran tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai, dalam pemilihan kepala desa untuk memahami dinamika politik lokal dan bagaimana demokrasi dijalankan di tingkat desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh warganya, karena prinsip demokrasi bukan hanya menjamin terlaksananya pembangunan desa, tetapi juga memastikan dukungan masyarakat yang penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Proses pemilihan kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa telah berlangsung sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.[3] Sejak tahun 2016,

[2] Ramadani, "*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal*" (Universitas Medan Area,2017),17
[3] https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024?utm_source

CamScanner

pemilihan kepala desa secara langsung dilakukan secara serentak di setiap kabupaten.[4]

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukanlah proses yang sederhana, karena banyak sekali tantangan yang muncul selama tahapan pelaksanaaan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, penghitungan suara, hingga pasca-pemilihan, semua memiliki dinamika tersendiri. Hal ini melibatkan kepentingan masyarakat luas, karena menyangkut kehidupan dan kesejahteraan mereka. Setiap tahap dalam Pilkades adalah bagian integral yang berperan penting dalam menentukan masa depan desa.[5]

Kiai dalam masyarakat umumnya memiliki banyak peran, seperti pendidik agama, pemuka agama, pelayanan sosial, dan dalam beberapa kasus yang terlibat dalam peran politik. Sebagai pendidik agama, kiai biasanya mengelola pondok pesantren, tempat mereka mengajarkan ilmu agama kepada para santri setiap hari.[6] Madura sendiri mempunyai istilah "bhepak, bheubuk, guru, rato." Yang mempunyai arti penggambaran tingkat penghormatan orang madura terhadap manusia dan lingkunganya dimana mereka berada.[7]

Konsep "*bhepak, bheubuk, guru, rato."* memiliki pengaruh yang kuat terhadap struktur sosial dan politik, termasuk dalam proses demokrasi lokal seperti pemilihan kepala desa. Figur-figur yang diwakili oleh istilah tersebut

---

[4] Zaenal Abidin As, "*implementasi nilai nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa didesa bandung barat*", journal of academia praja,

[5] Yuniwati Soetrisno, Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Indonesia Sosial Sains, vol.2 no.4, h. 672.

[6] Imam Sugrayogo, *Kyai Dan Politik,Membaca Citra Politik Kiyai* (Uin Malang: 2009), 4.

[7] Mochamad toha "*orang madura punya falsafah "bhepak, bheubuk, guru, rato*.", https://pepnews.com/2018/02/04/orang-madura-itu-punya-falsafah-bhuppa-bhabhu-ghuru-rato diakses pada tanggal 2 oktober 2024.

CamScanner

berperan sentral dalam membentuk keputusan politik masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kiai, sebagai sosok yang sering kali dianggap sebagai *"guru"* dan memiliki previlage dalam terminologi tersebut yang mana memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah pilihan politik masyarakat karna seorang kiai tidak hanya dihormati karena pengetahuan agama mereka, tetapi juga karena kemampuan mereka untuk membimbing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal memilih pemimpin yang tepat.[8]

Dalam konteks politik, beberapa kiai turut aktif berperan sebagai pemimpin atau penasehat politik, memberikan pandangan serta arahan moral kepada masyarakat maupun pemerintah. Keterlibatan kiai dalam politik sering kali didasarkan pada upaya mereka menjaga moralitas publik dan melindungi kepentingan umat. Dengan begitu, keberadaan kiai sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara agama, sosial, dan politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat.[9]

Seorang kiai tidak hanya berperan sebagai elite agama, tetapi juga sebagai figur yang memiliki pengaruh besar khususnya melalui keterlibatannya dalam aktivitas politik. Aktivitas politik kiai ini tidak terbatas di kota-kota besar, tetapi juga meluas hingga ke pedesaan. Tidak jarang, keterlibatan mereka dalam politik menimbulkan benturan dengan pemerintah. Beberapa kiai memilih untuk mendukung pemerintah, sementara yang lain berada dalam posisi yang

[8] Jihan Amalia Syahidah, "Peran Kiai Dalam Kontestasi Politik Local Di Madura*", as-Shahifah*: journal of constitutional law and governance.
[9] Nur Latifah nasir, "kiyai dan islam dalam mempengaruhi prilaku memilih masyarakat kota tasikmalaya *", jurnal politik profetik,* (agustus 2015), 32

CamScanner

berlawanan. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah kiai pemerintah dan kiai non-pemerintah di tengah masyarakat.[10]

Sebagai "guru" atau guru di kalangan masyarakat, kiai sering kali menjadi penghubung antara rakyat dan calon kepala desa. Peran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta memberikan arahan kepada masyarakat dalam memilih kepala desa yang diharapkan dapat menjalankan pemerintahan desa secara baik. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan kepala desa, peran kiai sering kali dijadikan sebagai alat penentu dalam menentukan pilihanya, karena masyarakat Madura cenderung mengikuti nasihat dan panduan mereka.

Lebih jauh lagi, dengan memahami konsep “bhepak, bheubuk, guru, rato.”, kita dapat melihat bagaimana struktur sosial di Madura dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap proses politik dan demokrasi. Keterlibatan figur-figur sentral seperti kiai dalam pilkades menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh tradisi dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana proses demokratisasi berjalan di desa-desa yang memiliki tradisi kuat, serta bagaimana peran tokoh-tokoh lokal seperti kiai dapat memperkuat atau mempengaruhi hasil demokrasi lokal tersebut. Dengan demikian, penelitian tentang peran kiai dalam pemilihan kepala desa di Madura tidak hanya akan memberikan gambaran tentang dinamika politik, tetapi juga akan menyoroti bagaimana nilai-nilai tradisional

[10] Imam Sugrayogo, *Kyai Dan Politik,Membaca Citra Politik Kiyai* (Uin Malang: 2009),51.

CamScanner

seperti “bhepak, bheubuk, guru, rato yang berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dalam kehidupan masyarakat di desa.

Desa Potoan Laok terletak di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura Provinsi Jawa Timur. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Barat, Dusun Tengah, dan Dusun Timur.[11] Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk di Desa Potoan Laok mencapai sekitar 5.529 jiwa dengan 1.707 kartu keluarga (KK). Masyarakat di desa ini mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, dan beberapa bekerja di sektor informal lainnya.Di Desa Potoan Laok, terdapat satu pondok pesantren yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Kiai ini memegang peranan penting dalam menjaga tradisi keagamaan dan memberikan pendidikan kepada santri, sekaligus menjadi tokoh sentral dalam kehidupan sosial dan budaya di desa. Desa ini terkenal dengan kehidupan masyarakat yang religius dan erat dalam menjunjung tradisi Madura, di mana kiai memiliki pengaruh besar, termasuk dalam proses pemilihan kepala desa dan pengambilan keputusan penting lainnya di masyarakat.Kehidupan di Desa Potoan Laok sangat bergantung pada nilai-nilai keagamaan, yang terus dipelihara melalui peran pondok pesantren dan tokoh-tokoh agama setempat.[12]

Pada penelittian kali ini peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat desa setempat Bernama Osman Ali (54 tahun) sebelumnya peneliti bertanya apakah anda mengikuti proses pilkades di desa potoan laok. Dan peneliti

[11]Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015)". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Indonesia), diakses tanggal 7 oktober 2024.
[12] Moh Erfan Efendy, perangkat desa,*Wawancara langsung* (potoan laok,2024).

CamScanner

juga menanyakan tentang apa yang menjadi dasar beliau memilih pemimpin desa (kepala desa) tak lupa peneliti menanyakan juga terkait fenomena yang terjadi dimana ada keikut sertaan kiai dalam menentukan calon pemimpin desa. beliau menjawab ketika memilih pemimpin desa beliau mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, beliau melihat apakah calon tersebut memiliki rekam jejak yang baik dan pengalaman dalam membantu masyarakat. Kedua, Beliau juga melihat apakah calon tersebut memiliki hubungan baik dengan tokoh agama dan masyarakat termasuk kiai. bagi beliau peran seorang kiai sangat berpengaruh, dan dukungan mereka menjadi salah satu petunjuk bagi beliau dalam menentukan pilihan. Selain itu, beliau juga mengatakan yang paling penting adalah apakah calon kepala desa memiliki niat tulus untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karna beliau menginginkan pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga peduli terhadap pembangunan desa dan kepentingan Bersama.[13]

Selain tokoh masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan 2 informan pemuda dari Desa Potoan Laok bernama Abdus Salam (27 tahun) dan faisol (23Tahun). Yang mana mereka juga terlibat langsung pada pemilihan kepala desa. peneliti bertanya dampak apa yang dirasakan dari fenomena adanya peran kiai yang secara langsung memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala desa. Abdusalam menuturkan bahwasanya peran kiai memang sangat membantu menjaga ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Ketika kiai memberikan dukungan kepada salah satu calon, masyarakat umumnya mengikuti

[13] Osman Ali , Tokoh Masyarakat, *Wawancara langsung* (potoan laok,2024).

CamScanner

arahan beliau, karena kiai dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati.

Proses Pilkades lebih tenang tanpa adanya pertikaian atau konflik seperti "carok" dan perpecahan, yang sering terjadi di daerah-daerah madura tertentu yang hal itu terjadi jika adanya ketegangan dalam pemilihan. Berkat peran kiai, masyarakat jadi lebih menghargai perbedaan pilihan dan lebih mengutamakan persatuan setelah pemilihan selesai. Ujar Abdussalam

Hal ini menjadi sangat baik karna dibeberapa kejadian pemilihan kepala desa ini jika tidak melibatkan ulama' (kiai) bisa menjadi perpecahan masyarakat. Dan beliau juga setuju terkait pernyataan dari Abdussalam yang menyatakan karna adanya petunjuk dari kiai masyarakat dijauhkan dari kegaduhan dan keributan. Ujar Faisol dalam wawancara ini.[14]

Bersadarkan konteks penelitian yang telah di paparkan, penulis bermaksud akan meneliti bagaimana "Peran sentral kiai dalam proses demokrasi lokal analisis pemilihan kepala desa di desa potoan laok, kecamatan palengaan, kabupaten pamekasan"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kiai dalam proses pemilihan kepala desa di desa potoan laok,kecamatan palengaan,kabupaten pamekasan?

[14] Abdussalam dan Faisol, selaku sales dan pemuda desa, *wawancara langsung* (potoan laok 2024)

CamScanner

2. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap proses pemilihan kepala desa di desa potoan laok,kecamatan palengaan,kabupaten pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan fokus penelitian diatas terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini,antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kiai dalam proses pemilihan kepala desa di desa potoan laok,kecamatan palengaan,kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum terhadap proses pemilihan kepala desa di desa potoan laok,kecamatan palengaan,kabupaten pamekasan..

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami peran kiai dalam demokrasi lokal, terutama dalam konteks masyarakat Madura. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangsih pemikiran bagi studi-studi terkait politik lokal, budaya, dan agama. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, serta kalangan ilmiah lainnya, seperti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, yang tertarik mendalami hubungan antara tokoh agama dan politik lokal.

CamScanner

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi pembaca, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat umum, mengenai dampak dari keterlibatan kiai dalam proses demokrasi lokal. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat di lapangan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi calon kepala desa dan masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga keharmonisan dalam proses Pilkades, terutama di daerah yang memiliki tradisi kuat seperti Madura.

E. Definisi Oprasional

Peneliti akan menjelaskan dan memaparkan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi perbedan dalam menafsirkan istilah sehingga bisa mencapai tujuan yang ada pada penelitian ini dan dapat memberitahukan kepada pembaca terkait istilah dan makna yang ada dalam penelitian kali ini. Judul dalam penelitian ini yaitu: “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kiai Dalam Suksesi Pemenangan Calon Kepala Desa Di Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura.” Penegasan istilah istilah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan menempatkan hukum sebagai bagian dari

CamScanner

fenomena sosial yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, politik, dan struktur sosial. Sosiologi hukum berfokus pada cara hukum dibuat, diterapkan, dan dipahami oleh masyarakat, serta bagaimana hukum memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Selain itu, sosiologi hukum juga mengkaji peran institusi seperti pengadilan atau polisi dalam menjaga tatanan sosial, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap keadilan memengaruhi efektivitas hukum tersebut. Dengan demikian, sosiologi hukum membantu memahami hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari dan realitas sosial yang kompleks.[15]

2. Kiai

   Dalam konteks penelitian kali ini kiai merujuk pada tokoh agama yang memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Kiai bukan hanya pemimpin keagamaan yang memimpin pesantren dan mengajarkan ilmu agama, tetapi juga dianggap sebagai figur yang dihormati dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik lokal seperti pemilihan kepala desa.[16]

[15] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*,18.
[16] Syaikhu Rozi, Saifudin, M. Ali Rohmad, Dan M. Syarif, *"Peran Politik Kyai dalam Pengendalian Konflik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)",* 2019,120-130.

CamScanner

3. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.[17]

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dengan memberikan hak suara sepenuhnya. Hak suara yang diperoleh oleh masyarakat yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia, dengan ditentukan secara aturan bagi warga negara yang telah memenuhi pemenuhan haknya.[18]

---

[17] Etik Taqririah: "*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang"* (Banten: Iain Smh Banten,2016), 27.

[18] Firmadi, Alhusni, dan Alamansyah, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pamekasan,"* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) 123-135.

CamScanner